

Kerjasama Ekonomi Indonesia-China dan Sengketa Laut Natuna di Era Kepemimpinan Joko Widodo

Tahun 2014-2023

Melany Putri Bella Cristina¹
Annisa Kirana Andaneswari²

¹*Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur
Indonesia*

²*Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur*

e-mail : Annisa_kirana.hi@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

Using a constructivist approach, this study seeks to explain the reason why China and Indonesia's economic cooperation has actually grown higher amidst their conflict over South China Sea. The SCS dispute has "dragged" Indonesia along with China claim over The Natuna Sea in the Riau Island which actually part of Indonesia's Exclusive Economy Zone. The dispute intensified when China's ships unlawfully entered Natuna waters in 2016 to conduct fishing operations. Ironically, economic cooperation between China and Indonesia has actually increased despite the dispute of Natuna Sea. Previously, United States and Japan were Indonesia's main trading partners, but since 2016, China has taken their place. China is now leading as Indonesia's top trading partner. Moreover, China since 2016 has become the second largest investor for Indonesia after Singapore. Researchers assume that economic cooperation has become intense even in the midst of the SCS conflict because the two countries have interests driven by similar projection ideas about economic development and the closeness of identity between President Jokowi and President Xi Jinping. For constructivists, state interests are dynamic and interests might change along with normative social interactions. This study uses a qualitative method with an emphasis on tracing conflict and cooperation data between the two countries. The data will be interpret further by using constructivist approach.

Keyword: *Economic Cooperation, Natuna Sea Conflict, Constructivism, Jokowi*

Penelitian ini bertujuan untuk memahami alasan mengapa kerjasama Ekonomi China dan Indonesia justru semakin meningkat di tengah konflik Laut China Selatan (LCS) menggunakan perspektif konstruktivisme. Dalam perkembangannya, konflik LCS telah "menyeret" Indonesia sejak China melakukan klaim sepihak terhadap kawasan perairan Zona Ekonomi Eksklusif yakni Laut Natuna di Kepulauan Riau. Konflik tersebut semakin memanas ketika tahun 2016 kapal-kapal China secara ilegal memasuki perairan Natuna dan melakukan aktifitas penangkapan ikan. Ironisnya, di tengah ketegangan politik China-Indonesia tersebut, kerjasama ekonomi keduanya justru semakin intensif. Sejak tahun 2016, China telah menggeser Jepang dan Amerika Serikat yang sebelumnya merupakan partner dagang utama Indonesia. Tahun 2016 – 2023, China telah menjadi partner dagang utama Indonesia sekaligus investor terbesar setelah Singapore dan Jepang. Peneliti beranggapan bahwa kerjasama ekonomi menjadi intens meski di tengah konflik LCS karena kedua Negara memiliki kepentingan yang didorong oleh kesamaan gagasan akan proyeksi pembangunan ekonomi dan kedekatan identitas antara Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping. Bagi konstruktivis, kepentingan Negara bersifat dinamis dan dapat berubah seiring dengan interaksi sosial yang bersifat normative. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menekankan pada penelusuran data konflik dan data kerjasama kedua negara untuk kemudian diinterpretasikan melalui pendekatan konstruktivisme.

Kata Kunci: *Kerjasama ekonomi, Konflik Laut Natuna, konstruktivisme, Jokowi*

Latar Belakang

Di tengah ketegangan yang terjadi antara China-Indonesia dalam kasus Laut China Selatan, kerjasama ekonomi keduanya justru semakin kuat. Dinamika dari hubungan kerjasama di tengah situasi konflik belum banyak dikaji sehingga penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengapa kerjasama ekonomi semakin intens di tengah situasi konflik geopolitik antara China dan Indonesia. Penelitian ini menjadi penting sebagai rujukan bagi para peneliti, pemerintah dalam menjaga kerjasama bilateral ditengah konflik. Penelitian yang dilakukan oleh Koichi Sato menekankan pada upaya mengelola konflik diantara Negara-Negara ASEAN dan China melalui Konferensi Internasional yang dikenal dengan *conference diplomacy* sebagai contoh ASEAN-China summit (Sato Koichi, 2013). Koichi berargumen bahwa China lebih memilih bilateral negoisasi melalui forum ASEAN untuk mengelola konflik China seperti konflik atas Laut China Selatan dengan Indonesia dan Konflik Scarbourg Shoal antara Filipina karena ASEAN menawarkan *regime-based consensus* dan mediator. Di sisi lain, penelitian dari Bama Putra melihat konflik Laut China Selatan (LCS) melalui kacamata neoklasik realisme (Ripmann) dengan penekanan pada persepsi elit Brunei yang mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri Brunei. Terlepas dari konflik LCS, Brunei tetap bekerjasama dengan China dibawah payung BRI karena terdapat kalkulasi kepentingan nasional yang amat ditentukan oleh persepsi elit (Bama Putra, 2020). Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi celah dengan menggunakan lensa konstruktivis untuk memahami dinamika konflik dan kerjasama antara China -Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terancam dirugikan akibat klaim sepahak China terhadap Laut China Selatan (LCS). Sebagian kawasan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yakni Laut Natuna di Kepulauan Riau masuk dalam peta klaim sepahak China. Dalam perkembangannya, konflik LCS telah “menyeret” Indonesia sejak tahun 2010, setelah China mengklaim wilayah utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. China beralasan pihaknya berhak atas perairan di Kepulauan Natuna atas dasar argumen traditional fishing zone (Wahyuni, 2023). Klaim sepahak China atas perairan Natuna masih terus berlanjut hingga membawa Indonesia dan China pada situasi bersitegang pada tahun 2013. Ketegangan ini mencapai puncaknya di tahun 2016 dimana sejumlah kapal nelayan China memasuki wilayah ZEE Indonesia dan melakukan sejumlah kegiatan illegal, unreported, and unregulated fishing.

Insiden tersebut kembali terjadi pada tahun 2019, dimana tak hanya kapal nelayan melainkan *coastguard* China juga melakukan pelanggaran serupa. Berbagai insiden pelanggaran di atas terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara China dan Indonesia. Pemerintah China mengklaim bahwa kapal-kapal coast guard (penjaga pantai) dan nelayannya berhak untuk berlayar dan berpatroli di area nine dash line. Sementara itu, pemerintah Indonesia tidak mengakui *nine dash line* dan menganggap bahwa China telah melakukan pelanggaran di wilayah ZEE Indonesia, yaitu di perairan Laut Natuna Utara (Sulistyani, 2021). Semakin meningkatnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh China tidak serta merta membuat Indonesia berdiam saja, justru sebaliknya Indonesia merespon dengan tegas atas terjadinya insiden tersebut dengan menempuh jalur diplomatik melalui pemberian nota protes terhadap China dan melakukan pemanggilan Duta Besar China. Kemudian, untuk menjaga dan memantau wilayah perairan Natuna dari kapal-kapal pencuri ikan illegal oleh pihak China, maka diadakan patroli secara rutin yang dilakukan oleh para Tentara Nasional Indonesia.

Dalam keadaan bersengketa, umumnya negara yang terlibat akan saling menunjukkan resistensi dalam kerjasama di sektor lain termasuk Ekonomi. Namun, hal ini tidak terjadi pada konteks konflik China-indonesia. Bahkan, kerjasama Indonesia dengan

China semakin “mesra” terutama dalam bidang investasi, perdagangan, dan pariwisata. Banyaknya penanaman investasi oleh China menjadikan negara tersebut sebagai salah satu investor asing terbesar di Indonesia setelah Singapura dan Jepang. Pada awal kepemimpinan Jokowi di tahun 2015 nilai perdagangan China-Indonesia mengalami peningkatan menjadi US\$48.2 miliar, progress ini terbilang signifikan bila melihat pada 2005 hanya mencapai US\$8.7 miliar saja (Atlas Complexity Trade, 2005). Sejak Jokowi resmi menyandang gelar sebagai Presiden pada 20 Oktober 2014 hingga tahun 2017 Indonesia telah menyepakati total sebanyak 36 MoU bersama dengan China sebagaimana yang telah dicatat oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Pada tanggal 25-28 Maret 2015 saat perayaan 65 tahun relasi bilateral antar kedua negara, Jokowi dan Xi Jinping membahas mengenai peningkatan kerjasama pada bidang ekonomi. Melalui momen tersebut kedua negara berhasil menyepakati delapan MoU beberapa diantaranya yaitu, Nota Kesepahaman Kerjasama antara Kemenko Perekonomian RI dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional China, Nota Kesepahaman Kerja sama Bidang Industri dan Infrastruktur antara Kementerian BUMN, Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional China, dan Nota Kesepahaman Kerja sama Proyek Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung antara Kementerian BUMN dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional China (CNN Indonesia, 2019). Pada tahun 2018 penanaman investasi asing dari China mencapai USD 1.34 miliar. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak Januari-Maret 2019 Penanaman Modal Asing (PMA) terbesar di Indonesia berasal dari Singapore dan China. Berdasar penelusuran data konflik dan kerjasama tersebut, penelitian ini berupaya untuk menelaah alasan-alasan yang mendasari kedua negara untuk tetap bekerjasama di tengah sengketa Laut Natuna melalui lensa konstruktivisme.

Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan metode penulusuran data konflik dan kerjasama antara China dan Indonesia pada kurun waktu 2014-2023. Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap penting oleh individu atau kelompok terkait suatu masalah sosial atau manusia. Fokus utama adalah pemaknaan, pengalaman, dan interpretasi dari sebuah fenomena (Cresswell, 2016). Penelitian kualitatif memberikan ruang eksplorasi di level ontology untuk melihat hakikat realitas (Cresswell, 2016). Sedangkan menurut Donatella Porta, kualitatif mampu merekonstruksi ilmu pengetahuan lepas dari objektivitas statistik (Porta, 2013).

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data-data sekunder yang diperoleh dari sumber yang terpercaya dan kredibel seperti melalui buku, jurnal, media dan website resmi. Peneliti juga menggunakan database UN-Comtrade untuk melacak aktifitas perdagangan Indonesia-China dari tahun ke tahun sehingga dapat dipetakan trend peningkatan aktifitas dagang kedua Negara. Setelah peneliti memetakan kerjasama ekonomi sekaligus konflik yang terjadi atas sengketa Laut China Selatan, data kejadian tersebut akan diinterpretasikan menggunakan pendekatan Hubungan Internasional. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan konstruktivis karena peneliti beranggapan bahwa kepentingan nasional bersifat dinamis, demikian juga kepentingan Indonesia dalam melakukan kerjasama ekonomi dengan China sekalipun keduanya memiliki konflik geopolitik. Bagi kaum realist kepentingan nasional bersifat statis, *given*, dipengaruhi oleh hal-hal yang materialistik dan *tangible*.

Bagi konstruktivist kepentingan tersebut dapat didorong oleh hal-hal yang bersifat *intangible* seperti norma, gagasan dan identitas (Fnnemore, 1996). Hal inilah yang bagi

peneliti dapat menjelaskan mengapa kerjasama ekonomi justru meningkat di tengah sengketa Laut China Selatan. Menurut Alexander Wendt, Signifikansi dari kepentingan akan tercipta ketika aktor memasuki interaksi yang mana masing-masing aktor akan berupaya untuk memaknai ulang tujuan dan kepentingannya. Dalam interaksi tersebut terjadi proses saling berbagi nilai, gagasan hingga menghasilkan kesepakatan bersama (Wendt A. , 2005). Oleh karena itu, Konstruktivisme menekankan pada interaksi sosial antar aktor di dunia internasional yang merupakan arena bagi para aktor untuk membentuk identitas dan kepentingannya. Alexander Wendt, di dalam bukunya yang berjudul Social Theory of International Politics menyebutkan bahwa terdapat dua asumsi utama dari konstruktivis, yaitu bahwa struktur dari asosiasi manusia ditentukan oleh shared ideas dan identitas bukan hanya kekuatan material semata (Wendt A. , 2000). Dalam hal ini, baik China dan Indonesia memiliki gagasan yang kompatibel dalam memproyeksikan pembangunan yakni gagasan Poros Maritim (Indonesia) dan gagasan One Belt One Road (China).

Hasil Temuan dan Pembahasan

Bagian ini akan mengelaborasikan hasil temuan dari penelitian yang telah dilakukan dengan membagi pembahasan menjadi empat bagian yakni : 1. Sejarah dan Dinamika Sengketa Natuna Indonesia-China. 2. Dinamika Kerjasama Ekonomi Indonesia-China. 3. Gagasan Pembangunan Indonesia -China di Era Presiden Joko Widodo. 4. Identitas Politik Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping

Sejarah dan Dinamika Konflik Indonesia-China atas Laut Natuna.

Sengketa Laut Dalam Kajian Hubungan Internasional Fenomena persengketaan di lautan merupakan fakta sejarah yang tidak asing lagi, bahkan menjadi bukti dari adanya perkembangan pada ranah konflik dan isu dalam kajian hubungan internasional maupun hukum laut internasional. Sejak dahulu laut sering juga digunakan sebagai instrumen dan media untuk melakukan ekspansi kekuasaan sehingga dapat menjadi sumber pertentangan dan pertikaian antar bangsa. Laut adalah salah satu objek yang masuk dalam pengaturan hukum internasional. Sengketa Laut China Selatan yang menyeret Indonesia ke dalam ketegangan berpusat pada Laut Natuna yang masuk sebagai Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (Butar, 2023). Kepulauan Natuna terletak di Provinsi Kepulauan Riau dan berada ditengah LCS dengan luas mencakup 264.198,37 Km², dimana 2.001,30 Km² adalah daratan sementara 262.197,07 Km² adalah perairan.



Gambar I: Laut Natuna (Sumber: Eprints UPN "Veteran" Yogyakarta).

Tekad China ingin menguasai Natuna telah terlihat sejak 1990-an hingga akhirnya di tahun 2010 China mencoba untuk menciptakan klaim atas dasar sejarah terhadap Natuna (Kaplan, 2011). Menurut perspektif China, dimasukkannya wilayah Natuna ke dalam peta territorial negaranya berdasarkan garis imajiner sembilan titik yang dikenal dengan sebutan *Nine Dash Line (NDL)*. Ketidaksepakatan China pada Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) terlihat melalui aksi perwakilan China pada kegiatan Workshop on *Managing Potential Conflicts in the South China Sea* di Surabaya. Ditengah workshop tersebut, delegasi China membagikan peta kepada seluruh delegasi yang berisi tentang delimitasi wilayah laut menurut pandangan China. Menanggapi hal ini Indonesia kemudian mengirimkan nota diplomatik pada bulan April tahun 1995, akan tetapi nota tersebut tidak mendapatkan balasan dari China. Dalam upayanya China juga menggunakan klaim *Traditional Fishing Grounds*. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri China melalui juru bicaranya pada 17 Juni 2016 yang menegaskan bahwa secara resmi Indonesia dan China mempunyai persoalan *overlapping claim* di LCS. China menyebutkan bahwa perairan di area kepulauan Natuna tumpeng tindih dengan klaim *Nine Dash Line* yang merupakan wilayah penangkapan tradisional China. Klaim tersebut telah dimuat dalam peta wilayah China, yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan pada salah satu kapal nelayan China yang memasuki perairan Natuna. Peta tersebut diterbitkan oleh Kantor Kemaritiman Nansha pada tahun 1994 yang mencantumkan perairan di sekitar pulau Natuna sebagai wilayah penangkapan tradisional China. Adanya klaim NDL, *Traditional Fishing Grounds*, serta masuknya kapal-kapal asing secara illegal China di perairan Natuna menimbulkan permasalahan yang serius bagi kedaulatan Indonesia.

Tabel 1
Inside Pelanggaran China di Laut Natuna era Presiden Jokowi

No.	Insiden		Kapal/Vessel	
	Tanggal	Detail Insiden	China	Indonesia
1.	22 Juni 2015	IUU Fishing oleh nelayan China	Shun Hang 618	KRI SSA-378
2.	19 Maret 2016	Intervensi terhadap kapal fregat Indonesia "HIU" oleh kapal penjaga pantai Tiongkok di Indonesia telah menyita kapal nelayan China.	Chinese Coast Guard and Kway Frey 10078	KKP HIU 101
3.	27 Mei 2016	Kapal Angkatan Laut Indonesia menangkap kapal nelayan China.	Gui Be Yu 27088	KRI Oswald Siahaan 354
4.	17 Juni 2016	Kapal angkatan laut Indonesia menangkap satu dari 10-12 kapal nelayan China di dekat Natuna setelah melepaskan tembakan peringatan. Dua kapal penjaga pantai China mendekat namun gagal membebaskan kapal tersebut.	Chinese Fishing Boat	KRI Imam Bonjol 383
5.	24 Desember 2019	Kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia menemukan kapal penjaga pantai China mengawal kapal nelayan Tiongkok di sekitar Laut Natuna	CCG 4301	KRI Tjiptadi-381

Sumber: Riska, 2016; Weatherbee, 2017; Muhibat, 2018; McRae, 2019; Butar, 2023.

Pada 2016 China kembali menyatakan secara tebuka bahwa wilayah perairan Natuna merupakan wilayah penangkapan ikan bagi China sejak era dinasti terdahulu. Namun klaim tersebut hanya berdasar klaim sejarah China dan tidak ada legitimasi kuat yang ditetapkan oleh Mahkamah Internasional melalui PBB bahwa klaim NDL tersebut sudah ada sejak tahun 1947 (Miranda, 2008). Pada 14 Juli 2017 pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, menerbitkan sekaligus mendaftarkan peta baru ke PBB yang di dalamnya terdapat perubahan nama pada wilayah laut di

bagian utara Kabupaten Natuna. Adapun sebelumnya wilayah tersebut bernama Laut China Selatan dan telah diubah menjadi Laut Natuna Utara. Meningkatnya insiden konfrontasi antar nelayan asing dan pihak keamanan Indonesia di perairan Natuna menjadi salah satu faktor yang mendorong dikeluarkannya peta tersebut. Pelanggaran dan konfrontasi yang dilakukan China di perairan Natuna terangkum dalam tabel berikut.

Kerjasama Indonesia-China Era Presiden Joko Widodo

Pada 24 Oktober 2014 Joko Widodo resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo, bersama dengan kabinetnya menyusun Rencana Pembangunan Menengah Nasional III. Di tahun 2016 Presiden Joko Widodo menetapkan sebagai tahun “percepatan” pembangunan nasional yang berfokus pada tiga pilar utama yaitu infrastruktur, pembangunan manusia, dan kebijakan deregulasi ekonomi. Pada era pemerintahan Jokowi, kerjasama bilateral Indonesia-China di bidang ekonomi mengalami peningkatan yang berarti. Sejak resmi menjabat sebagai presiden pada 20 Oktober 2014 pemerintah Indonesia telah menyeleksi 36 MoU dengan China. China juga merupakan negara yang pertama kali dikunjungi oleh Presiden Jokowi pada 8 November 2014, dimana pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi mengagendakan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping sebagai tuan rumah penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC ke22 (Mardhiyah & Pura, 2023). Selain itu, pada saat perayaan 65 tahun hubungan bilateral Indonesia-China, Presiden Jokowi kembali melakukan kunjungan ke China pada 25-28 Maret 2015. Dalam pertemuan tersebut kedua negara membahas hal-hal mengenai perekonomian terutama pada sektor infrastruktur, perdagangan, investasi, industri, pariwisata, dan relasi antara masyarakat demi mendorong kerjasama ekonomi-politik dan diplomatik antar keduanya (Putri & Maarif, 2024).

Pada kondisi bersengketa secara geopolitik, biasanya akan terjadi resistensi untuk menjalankan hubungan bilateral ekonomi. Namun, hal ini tidak terjadi dengan Indonesia-China ketika dihadapkan pada sengketa Laut Natuna. Justru menariknya kerjasama ekonomi antar kedua negara mengalami peningkatan yang signifikan meskipun diliputi oleh ketegangan yang mengancam wilayah kedaulatan negara. Hal ini buktikan dengan semakin eratnya hubungan kedua negara ketika Presiden Jokowi resmi menjabat sebagai kepala negara di tahun 2014. Total MoU antara Indonesia-China di sepanjang tahun 2014-2017 telah mencapai 36 MoU, serta diajukanya 28 proposal untuk menggandeng investor dari China di tahun 2019. BKPM menyebutkan bahwa sebagian besar Penanaman Modal Asing di Indonesia tahun 2019-2020 berasal dari China.

Tabel 3
Tabel Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2016-2020

2016		2017		2018		2019		2020	
Singapura	9,18	Singapura	8,44	Singapura	9,19	Singapura	5,38	Singapura	7,14
Jepang	5,40	Jepang	5,00	Jepang	4,95	China	3,31	China	3,51
Amerika	2,67	China	3,36	China	2,38	Jepang	3,24	Hongkong	2,48
China	2,25	Hongkong	2,12	Hongkong	2,01	Belanda	2,10	Jepang	2,13
Belanda	1,48	Korea Selatan	2,02	Malaysia	1,77	Hongkong	1,75	Korea Selatan	1,14
Lainnya	8,00	Lainnya	11,30	Lainnya	9,00	Lainnya	5,41	Lainnya	4,52

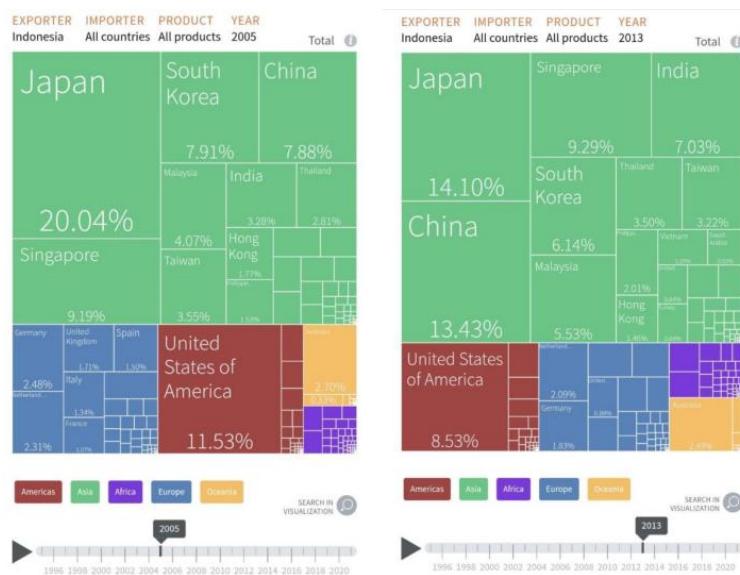
*Investasi dalam Rp Triliun

Sumber : Kementerian Investasi BKPM

Tabel di atas merupakan data dukung yang menunjukkan bahwa Negara yang berinvestasi di Indonesia tahun 2016-2020 mengalami perubahan. Pada tahun 2016, 3 negara investor terbesar di Indonesia ialah Singapura, Jepang dan Amerika. Di tahun selanjutnya Singapura dan Jepang konsisten meduduki posisi ke satu dan dua sebagai investor asing di Indonesia. Tahun 2019-2020 China menggeser posisi Jepang sebagai investor ke dua terbesar setelah Singapura. Tahun 2021-2024 China berada di posisi ke dua sebagai investor Indonesia terbesar di sektor perdagangan dan reparasi. Adapun Singapura yang konsisten berada di posisi pertama sebagai penanam modal asing di Indonesia merupakan kontribusi dari Pengusaha Indonesia yang bisnisnya beroperasi di Singapura. Intensitas Investasi China juga dapat dilihat dari destinasi prioritas yang dimiliki oleh China's Ministry of Commerce (MOFCOM) di mana Asia Tenggara termasuk Indonesia merupakan target destinasi utama dari Investasi China (MOFCOM, 2023). Pernyataan ini juga didukung oleh The China Global Investment Tracker (CGIT) yang telah memetakan Negara destinasi China untuk berinvestasi. Di tahun 2023, investasi China di ASEAN meningkat 34,7% dari tahun sebelumnya di mana Indonesia menjadi destinasi prioritas ke dua setelah Vietnam. *China Outbond Direct Investment* (ODI) tidak sekedar merefleksikan keputusan bisnis semata, melainkan ada aspek politik yang mendorong China menjadikan Indonesia destinasi prioritas.

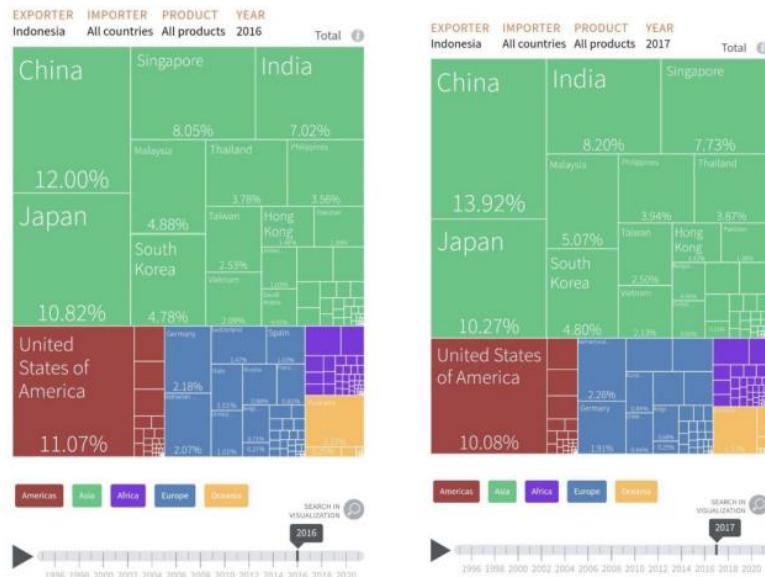
Kedekatan hubungan ekonomi antara China dan Indonesia lebih terlihat lagi ketika berbicara konteks perdagangan internasional. Sepanjang tahun 2020-2024, China menjadi partner dagang utama untuk Indonesia. Posisi China menjadi partner dagang utama Indonesia menggeser posisi Jepang sekaligus mengambil proporsi pasar Amerika Serikat yang ada pada periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seperti visual peta data expor-impor di bawah ini

Gambar 4 dan 5
Persentase Pergerakan Ekspor-Impor di Era Susilo Bambang Yudhoyono.



Sumber: atlas.cid.harvard.edu

Gambar 6, 7 Persentase Pergerakan Ekspor-Impor di Era Joko Widodo



Sumber: atlas.cid.harvard.edu

Hasil penelusuran aktifitas perdagangan yang dilakukan Indonesia secara global pada periode Susilo Bambang Yudhoyono dan periode Joko Widodo menunjukkan pergeseran partner dagang utama dari Jepang menuju China. Hal ini mengkonfirmasi data kualitatif peningkatan kerjasama ekonomi antara China dan Indonesia pada Periode Jokowi. Fakta bahwa kerjasama ekonomi China-Indonesia semakin intensif meski di tengah sengketa Laut Natuna menjadi penting untuk dikaji dalam studi Hubungan Internasional.

Dinamika Kerjasama dan Konflik Indonesia-China melalui Pendekatan Konstruktivisme

Pada umumnya ketika sebuah negara bersengketa dengan negara lain maka akan berpengaruh pada situasi politik dan ekonomi negara tersebut. Berdasarkan data pada tahun 2016 dan 2019 aksi pelanggaran yang dilakukan oleh China terbilang agresif, dan terhitung sudah dua kali pemerintah Indonesia mengirimkan nota protes ke Kedutaan Besar China atas tindakan tersebut, akan tetapi persentase aktivitas ekspor dan impor antar Indonesia-China justru menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2014 (10.87%), 2015 (10.36%), 2016 (12.00%), 2017 (13.92%), 2018 (15.37%), dan 2019 (16.83%) (BKPM, 2021). Di era SBY, Jepang merupakan partner dagang utama Indonesia sedangkan di era Jokowi, China menempati urutan pertama sebagai partner dagang dan urutan kedua sebagai investor. Untuk menjawab fenomena tersebut, akademisi HI banyak menggunakan rational choice theory di mana kalkulasi aspek material menentukan keputusan akan mengutamakan kerja sama atau berperang. Tak sama dengan penelitian sebelumnya, yang menekankan pada aspek material, penelitian ini berupaya untuk melihat pada pendekatan konstruktivis. Gagasan, identitas politik dan norma menjadi aspek penting untuk dianalisa dalam hubungan internasional. Identitas serta kepentingan para aktor dalam konstruktivis ditentukan oleh *shared ideas* yang artinya interaksi antar aktor pada ranah struktur sosial, ekonomi, politik, budaya (Maarif, 2023). Konstruktivis menyebutkan bahwa dalam sengketa, terdapat keterkaitan yang erat antara aktor dan strukturnya. Adapun struktur yang dimaksud bukan suatu hal

yang telah ada sejak dahulu, namun merupakan hasil dari pola interaksi yang terbangun dari praktik sosial secara berkesinambungan oleh aktor tersebut. Interaksi berulang membangun atribut seperti ide/gagasan, norma dan identitas yang mempengaruhi bagaimana perilaku aktor dalam merespon sengketa yang terjadi (Lantang, 2024).

Alexander Wendt, menekankan pentingnya *shared ideas* (gagasan bersama) dalam hubungan internasional yang artinya dalam kacamata konstruktivis “identitas dan kepentingan dari aktor dibangun oleh ide-ide bersama” (Mabrurah & Ramadhani Z, 2021). Gagasan bersama ini dapat terbentuk melalui interaksi yang intensif antara individu ataupun instansi. Berdasar penelusuran data, sengketa Laut Natuna yang terjadi di antara Indonesia-China tidak berdampak negatif bagi hubungan kerjasama ekonomi antar kedua negara. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan yang erat antar Indonesia-China pada era Joko Widodo, akibat pola interaksi yang dilakukan secara terus menerus hingga menemukan kesamaan gagasan untuk bekerjasama. Diketahui Joko Widodo beberapa kali melakukan lawatan ke China dan komunikasi ke dua Presiden berlanjut cukup intensif melalui telepone (Tempo, 2025). Kedekatan ke dua presiden tersebut juga nampak dari keinginan China untuk berkolaborasi dalam Konferensi Asia Afrika yang ke 70 di Bandung. China yang diwakili oleh Mao Ning juru bicara Kementerian Luar Negeri China menyampaikan keinginan mereka untuk berkontribusi pada gagasan Bandung Spirit yang menekankan pada koeksistensi Global South dalam menavigasi perdamaian dan keamanan dunia (Socialistchina, 2025). Komitmen China untuk berkontribusi dalam mengisi Bandung Spirit juga berlanjut pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo yang secara politik kemenangannya didukung oleh Presiden Jokowi (Xinhuanews, 2025).

Menurut Alexander Wendt, pada interaksi yang dilakukan negara sebagai aktor di dalamnya terdapat atribut seperti gagasan, identitas dan norma yang akan berdampak pada pembentukan kepentingan nasional dari kedua negara. Peneliti beranggapan bahwa aspek non-materialistis yang secara tidak langsung terbangun melalui interaksi telepon dan pertemuan mampu merekonstruksi ulang kepentingan nasional ketika ada konflik. Hal inilah yang kemudian terjadi di antara Indonesia-China dalam merespon ketegangan yang ada di Laut Natuna. Kepentingan nasional terbentuk secara sosial dan berangkat dari hubungan antar aktor dan negara sebagai unit politik dan struktur pergaulan negara dalam politik internasional. Kepentingan nasional sewaktu-waktu akan terbentuk, berubah, dan menyesuaikan diri dengan struktur politik internasional yang ada. Hal tersebut memungkinkan karena struktur pada dasarnya dirancang tidak hanya dari pertarungan material, namun juga melalui pembentukan gagasan/ide bersama. Pendekatan konstruktivis menaruh perhatiannya pada analisa sebab-akibat dari struktur pada identitas dan kepentingan. Para pengikut teori ini memandang bahwa penerimaan serta penolakan yang terjadi dalam sebuah interaksi antar negara dilandasi oleh faktor-faktor nonmaterial misal seperti kesepakatan bersama, hal ini mampu menekan negara-negara atau aktor untuk patuh terhadap aturan internasional. Sedangkan, tindakan yang mengedepankan kekuatan fisik dianggap tidak terlalu efektif untuk menghadirkan kepatuhan dalam sistem internasional (Mabrurah, 2021).

Shared Ideas Pembangunan Indonesia-China di Era Presiden Joko Widodo

Kerja sama Negara di tengah konflik dapat terjadi karena pihak yang berkonflik melihat adanya keuntungan interdependensi yang lebih tinggi dibanding biaya untuk terus berkonflik. Alasan tersebut sudah banyak terjawab dan dijelaskan menggunakan *rational choice theory*. Di sisi lain, alasan yang melampaui aspek materialisme seperti cara pandang konstruktivis belum banyak dibahas. Penelitian ini berupaya mengeksplorasi aspek non-materialisme yang turut mempengaruhi dinamika

kerjasama ekonomi Indonesia-China. Indonesia dan China memiliki kesamaan dalam visi Poros Maritim Dunia dan program BRI yang dimana hal ini dimuat dalam tujuan dari kedua proyek tersebut. Poros Maritim Dunia muncul di tahun 2014 karena adanya gagasan yang diberikan oleh Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang menjadi pusat maritim di dunia. Poros Maritim Dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim (Ardiyanti, 2018). Dasar yang digunakan Indonesia untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia yakni adanya klaim secara historis kejayaan maritim Indonesia pada masa kerajaan Majapahit di era pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan kerajaan Sriwijaya pada era pemerintahan Raja Balaputradewa pada abad ke 14 sampai abad ke 15. Dengan kekuatan maritimnya dua kerajaan tersebut memperoleh keuntungan perdagangan dan ekonomi dikarenakan kemampuannya dalam mengawasi pusat-pusat perdagangan dan jalur perdagangan laut yang melewati wilayah perairan Nusantara (Manggala, 2025).

Sementara itu China dengan program BRI-nya hadir pada tahun 2013 sebagai program kerja pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur dalam jangka waktu lama sekaligus menjadi bagian dari kebijakan luar negeri China. BRI hadir berdasar klaim sejarah atas jalur perdangan leluhur China atau yang dikenal sebagai jalur sutra telah ada sejak masa Dinasti Han yang menemukan wilayah tersebut pada abad 2 Masehi dan Dinasti Yuan pada abad ke-12, lalu oleh Dinasti Ming dan Dinasti Qing pada abad ke-13. BRI sendiri merupakan bagian dari “The Chinese Dream yang berisikan impian China terhadap situasi ideal dalam hal ekonomi, politik dan peradaban kejayaan masa lampau (Dwianto, 2022). Berdasarkan landasan dan tujuan dari program kebijakan Poros Maritim Dunia dan BRI terlihat adanya shared ideas (gagasan bersama) yang sejalan, yakni keduanya sama-sama berangkat dari klaim historis pada masa pemerintahan leluhur yang sudah lebih dulu menghidupkan dan mengelolah wilayah yang dimaksud dalam program tersebut. Kemudian, keduanya juga sama-sama berangkat dari gagasan yang secara garis besar betujuan untuk melakukan pembangunan infrastruktur laut dan darat, meningkatkan koneksi dengan negara lain, memperkuat kerjasama ekonomi sekaligus melakukan pemerataan pembangunan ekonomi khususnya pada sektor infrastruktur dan manufaktur.

Identitas Partai Politik Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping

Dalam pengertian filosofis, identitas ialah salah satu atribut yang membentuk tindakan atau perilaku tertentu. Identitas dibentuk oleh berbagai faktor seperti kebudayaan, ilmu pengetahuan, agama, ideologi politik, keyakinan normatif dll (Hayyes, 2017). Wendt, mengkategorikan empat jenis identitas antara lain yakni identitas personal, identitas golongan, identitas politik. Konstruktivis mendefinisikan identitas sebagai atribut aktor internasional yang bertujuan memberikan dukungan dan mendorong perilakunya. Identitas juga menjadi landasan dari kepentingan aktor yang bersangkutan. Dengan kata lain, pemaknaan aktor tentang ‘siapa kami’ dan ‘siapa mereka’ akan menentukan pandangan aktor terhadap sebuah negara, individu, dan golongan. Pemaknaan identitas akan mempengaruhi kepentingan yang hendak dicapai. Kepentingan ini pada gilirannya akan menentukan tindakan apa yang akan diambil negara tersebut. Dengan demikian, identitas diperlakukan sebagai variabel independen yang menjelaskan perilaku negara. Konstruktivis juga menganggap identitas adalah entitas yang dapat berubah sejalan dengan kepentingan yang tidak bersifat tetap, namun dapat berubah seiring terjadinya interaksi dalam struktur politik dan sosial (Smith, 2005).

Artikel ini berpandangan bahwa identitas politik kedua pemimpin turut mempengaruhi dinamika Kerjasama ekonomi Indonesia dan China. Identitas politik yang dimaksud penulis ialah identitas partai politik dan ideologinya. Joko Widodo merupakan presiden yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memiliki ideologi Marhaenisme. Marhaenisme adalah gagasan khas Indonesia yang dirumuskan oleh Soekarno, ideologi ini memiliki sejumlah persamaan mendasar dengan sosialisme. Kesamaan tersebut tampak pada tujuan, nilai, dan orientasi ekonomi-politis.

Marhaenisme dan sosialisme sama-sama menolak kapitalisme ala barat. Keduanya mengkritik sistem ekonomi barat yang dianggap menciptakan ketimpangan antara pemilik alat produksi dan pekerja. Kesamaan identitas partai politik ini yang kemudian menciptakan kedekatan antara kedua pemimpin tersebut. Terlepas dari dinamika keretakan internal antara Jokowi dan PDIP di periode ke dua Joko Widodo memerintah, hal itu tak serta merta merubah persepsi China atas afiliasi partai politik Joko Widodo.

Kedekatan Joko Widodo dengan diaspora China yang ada di Indonesia maupun warga Negara Indonesia keturunan China nampaknya berkontribusi dalam membangun *“trust”* Pemerintah China untuk mengarahkan prioritas destinasi investasi China ke Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Keputusan Negara untuk berinvestasi seringkali juga melibatkan analisa resiko politik termasuk politik identitas. Dari berbagai pernyataan resmi Pemerintah China, terdapat Kesan bahwa China memiliki *trust* untuk berinvestasi di Indonesia salah satunya karena kedekatan Joko Widodo dengan etnis Tionghoa di Indonesia. Korelasi antara keputusan bisnis dan identitas juga dibahas pada penelitian Setijadi yang menunjukkan adanya hubungan kuat antara kemampuan bahasa Mandarin, identitas sebagai keturunan Tionghoa dengan Kerjasama dagang dan investasi (Setijadi Charlotte, 2016). Dengan demikian, Presiden Xi Jinping tidak menafsirkan Presiden Joko Widodo sebagai ancaman atau rival politik melainkan partner yang potensial untuk memperkuat pengaruh geopolitik China di kawasan ASEAN. Seperti hal nya cara pandang konstruktivis yang melihat kepentingan Negara bukanlah sebuah pola ajeg, demikian pula penelitian ini memandang keputusan ke dua Negara untuk bekerjasama adalah hasil konstruksi kepentingan. China juga berupaya memperkuat pengaruhnya melalui Diplomasi Confucianisme ke Negara-Negara ASEAN misalnya dengan membangun *Confucius Institute* di Negara-Negara ASEAN termasuk Indonesia pada periode Joko Widodo

Untuk memperkuat argumentasi pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan komparasi politik yang memungkinkan penelitian ini membuktikan bahwa aspek identitas selalu memiliki ruang untuk menjelaskan keputusan politik. Penelitian ini membandingkan identitas Jokowi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Presiden SBY merupakan kepala negara yang bersal dari partai Demokrat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi liberal. Pada masa pemerintahan SBY kebijakan luar negeri Indonesia tampak condong kepada negara-negara yang menjunjung demokrasi seperti Amerika Serikat dan Jepang. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya intensitas kunjungan Indonesia ke AS yang bertujuan untuk meningkatkan relasi bilateral antar kedua negara, khususnya pada ranah kerjasama militer. Kemudian, bila dilihat dari grafik persentasi perekonomian Indonesia selama Presiden SBY menjabat dari 2004- 2014 negara Jepang tercatat sebagai mitra kerjasama ekonomi yang menempati urutan pertama. Jepang menjadi mitra penting pada masa itu karena menjadi investor terbesar di Indonesia. Berbeda halnya di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mana dalam kebijakan politik luar negerinya berkiblat ke arah China. Jokowi merupakan kader dari partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang dianggap sebagai partai politik yang mempunyai keterkaitan kuat pada ideologi marhaenisme (Gerald, 2019). Adapun PDIP dengan PKC (Partai Komunis China)

terlihat memiliki kedekatan yang intens. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya interaksi antar kedua partai. Pada tahun 2019 Presiden Jokowi menerima kunjungan dari Song Tao penasihat Hubungan Luar Negeri China sekaligus Kepala Politbiro Hubungan Internasional PKC atau International Liaison Department of the CPC (IDCPC). Setelah pertemuan tersebut Song Tao turut hadi pada undangan jamuan makan siang dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri (Raditya, 2019). Kemudian, pada tahun 2013 PDIP mengirim 15 kadernya ke China untuk meninjau pusat kesehatan anak dan mempelajari majaemen partai. Lalu dua tahun kemudian Megawati mengunjungi Provinsi Shenzhen untuk meresmikan gedung Pusat Kerjasama Indonesia-China. Pada tahun 2016 Presiden Jokowi menerima kunjungan delegasi PKC di Istana Merdeka.

Dari segi ideologi terdapat kemiripan antara ideologi Marhaenisme dari PDIP dan Sosialisme dari PKC. Marhaenisme merupakan ideologi perjuangan yang bersifat revolusioner dan beranggotakan kaum Marhaen yang diartikan sebagai kelompok yang hidup dalam kondisi mlarat atau terpinggirkan misal buruh, petani, dan rakyat yang tidak memiliki modal serta kekuasaan. Ideologi ini digagas oleh Presiden Soekarno pada masa pergerakan nasional. Sedangkan Sosialisme merupakan bentuk nasionalisme pada aspek politik, ekonomi, dan masyarakat dengan tujuan mencapai kesejahteraan, keadilan dan keselamatan masyarakat. Adapun konsep sosialisme ini sudah berkolaborasi dengan Maxisme yang mana paham tersebut tumbuh dalam pandangan kaum Marhaen untuk memberantas berbagai persoalan dalam negeri seperti korupsi, kemiskinan dan permasalahan penting lainnya. Mengacu pada pandangan konstruktivis bahwa identitas sebagai atribut aktor internasional yang bertujuan memberikan dukungan dan mendorong perilakunya. Identitas juga menjadi landasan dari kepentingan aktor yang bersangkutan. Maka relasi yang terjadi diantara Indonesia-China yang dipengaruhi oleh identitas partai menjadi faktor kedekatan antar kedua negara. Artinya, persamaan karakteristik ideologi partai mendorong kepala negara Indonesia dan China untuk bisa lebih dekat. Dengan begitu kedua negara dapat saling bertukar ide atau gagasan yang sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing pihak atau bahkan akan menciptakan kepentingan nasional yang baru bedasarkan gagasan bersama yang disetujui oleh kedua negara. Persamaan identitas justru akan mempermudah negara dalam mentransmisikan kepentingan nasionalnya hal inilah kemudian terjadi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan data-data yang ada menunjukkan angka perekonomian indonesia pada tahun 2014-2019 kian meningkat yang berarti kepentingan nasional yang direalisasikan melalui hubungan kerjasama ekonomi dengan China berjalan dengan baik. Selain keberadaan ide, norma, dan identitas yang menjadi alasan terebentuknya kepentingan nasional Indonesia-China ditengah sengketa Laut Natuna, juga terdapat peran organisasi regional yaitu ASEAN. Melalui ASEAN negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia berupaya membentuk gagasan bersama untuk dijadikan sebagai kebijakan atau acuan dan aturan yang mengikat negara-negara anggota dalam menentukan sikapnya di wilayah LCS. Adapun kebijakan tersebut berbentuk draft yang berisikan kode etik dan telah diratifikasi oleh negara-negara ASEAN sekaligus China sebagai negara yang gencar dalam mengklaim wilayah LCS. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas wilayah laut bagi negara-negara yang wilayahnya termasuk dalam klaim LCS. China turut meratifikasi draft tersebut dikarenakan dorongan hubungan kerjasama dengan ASEAN yang sudah dilakukan sejak tahun 1991 dan demi menjaga hubungan baik dengan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Menurut Martha Finnemore, dalam teori konstruktivis organisasi internasional seperti ASEAN mempunyai kemampuan untuk meneruskan norma atau aturan melalui organisasi internasional, yang kemudian membuat negara mengadopsi norma tersebut sebagai

kebijakan yang seharusnya menjadi kepentingan nasional di dalam negeri (Rachmawati, 2012).

Kesimpulan

Sengketa Laut Natuna terus berlangsung hingga memasuki masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ketegangan di Laut Natuna semakin meningkat di tahun 2016-2019 akibat tindak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal nelayan dan Coast Guard China secara terang-terangan. Akibat dari sengketa tersebut wilayah kedaulatan Indonesia menjadi terganggu. Akan tetapi, hal itu tidak berpengaruh pada relasi kerjasama ekonomi Indonesia-China yang justru menunjukkan adanya peningkatan. Penelitian ini berupaya untuk memahami alasan dibalik dinamika konflik dan kerjasama China-Indonesia melalui sudut pandang konstruktivisme yang menawarkan aspek-aspek non-material. Peneliti juga beranggapan bahwa konstruktivisme dibutuhkan dalam memahami dinamika kerjasama dan konflik antar Negara yang bersifat dinamis tergantung interaksi antar aktor-aktor yang ada di arena internasional.

Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa kerjasama ekonomi China-Indonesia justru semakin meningkat di tengah konflik karena dua unsur yang ada dalam konstruktivisme yakni : gagasan dan identitas. Gagasan Indonesia dan China dalam memproyeksikan pembangunan memiliki kompatibilitas. Peneliti beranggapan bahwa aspek non-materialis yang secara tidak langsung terbangun melalui interaksi telepon dan pertemuan mampu merekonstruksi ulang kepentingan nasional ketika ada konflik. Hal inilah yang kemudian terjadi di antara Indonesia-China dalam merespon ketegangan yang ada di Laut Natuna. Kepentingan nasional terbentuk secara sosial dan berangkat dari hubungan antar aktor dan negara sebagai unit politik dan struktur pergaulan negara dalam politik internasional. Kepentingan nasional sewaktu-waktu akan terbentuk, berubah, dan menyesuaikan diri dengan struktur politik internasional yang ada. Hal tersebut memungkinkan karena struktur pada dasarnya dirancang tidak hanya dari pertarungan material, namun juga melalui pembentukan gagasan/ide bersama.

Selain itu aspek identitas pemimpin dari kedua Negara juga memiliki kedekatan yang tak lain merupakan hasil dari interaksi yang dilakukan selama Rezim Pemerintahan Joko Widodo. Jokowi merupakan kader dari partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang dianggap sebagai partai politik yang mempunyai keterkaitan kuat pada ideologi marhaenisme (Gerald, 2019). Adapun PDIP dengan PKC (Partai Komunis China) terlihat memiliki kedekatan yang intens sekalipun tidak sepenuhnya sama. Identitas tersebut terbangun melalui interaksi Kepala Negara. Pada tahun 2019 Presiden Jokowi menerima kunjungan dari Song Tao penasihat Hubungan Luar Negeri China sekaligus Kepala Politbiro Hubungan Internasional PKC. Perbedaan identitas rezim pemerintah amat mempengaruhi arah kebijakan politik luar negeri sebuah negara. Presiden Xi Jinping tidak menafsirkan Presiden Joko Widodo sebagai ancaman atau rival politik melainkan partner yang potensial untuk memperkuat pengaruh geopolitik China di kawasan ASEAN. Seperti hal nya cara pandang konstruktivis yang melihat kepentingan Negara bukanlah sebuah pola ajeg, demikian pula penelitian ini memandang keputusan ke dua Negara untuk bekerjasama adalah hasil konstruksi kepentingan. Melalui interaksi lawatan, telepon dan forum diskusi, kedua pimpinan Negara tersebut transfer nilai, gagasan dan identitas terjadi hingga keputusan mengelola kerjasama ekonomi di tengah sengketa geopolitik tetap bisa berjalan.

Daftar Pustaka

- ADB. (2013). *Asian Development Bank*. Dipetik January 9, 2015, dari www.adb.org
- AEC Key Message Booklet. (2014). *ASEAN.org*. Diambil kembali dari www.asean.org
- Amawi, A. &. (2013). *The Theoretical Evolution of International Political Economy* (Thrid Edition ed.). Oxford: Oxford University Press.
- APEC.org. (2014). *Asia Pacific Economic Cooperation*. Dipetik December 20, 2014, dari www.apec.org
- Ardiyanti, D. (2018). Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia . *Resolusi Jurnal Sosial dan Politik Vol 1 No 02*, 32-45.
- ASEAN.org. (2014). *ASEAN*. Dipetik December 30, 2014, dari www.asean.org
- BBC News. (2014). *Apec summit: Chinese trade pact plan backed by leaders*. Dipetik December 20, 2014, dari <http://www.bbc.com/news/world-asia-29999782?print=true>
- Beeson, M. (2009). *Institutions of the Asia Pacific : ASEAN, APEC and beyond*. New York: Routledge.
- Bower, E. Z. (2012). The U.S.-ASEAN Relationship in 2030. *CSIS Publication*(May 11).
- Breslin, S. e. (2002). *New Regionalism in Global Political Economy*. London: Routledge.
- Butar, D. A. (2023). Pergeseran Strategi Indonesia dalam Sengketa Dengan Tiongkok Antara Tahun 2009 Dan 2022 Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah Di Perairan Natuna Utara. *Jurnal Pertahanan*, 37-52.
- Chai, K. G. (2010). *The Politics of Economic Regionalism: Explaining Regional Economic Integration in Asia*. London: Palgrave Macmillan.
- Cheng-Chwee Kuik, N. A. (2012). The China Factor in the U.S. "Reengagement" With Southeast Asia: Drivers and Limits of Converged Hedging. *Asian Politics & Policy*, 315-344.
- CNN, I. (2016, Juni 23). Jokowi Gelar Rapat Tembak Kapal China.
- Das, S. B. (2013). RCEP and TPP: Comparison and Concern. *ISEAS Perspective*.
- Dwianto, D. A. (2022). Konstruksi Xi Jinping dalam Belt and Road Initiative . *Jurnal Sosial Politik vol 8 no 1*, 45-61.
- Farrell, M. B. (2005). *Global politics of regionalism : an introduction*. London: Pluto Press.
- Fnnemore, M. (1996). *National Interest and International Security*. Cornell University Press.

- Gerald. (2019). Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik . *Political :Jurnal Ilmu Politik Vol 1 No 2*, 135-157.
- Graham, E. (2014). Southeast Asia in the US Rebalance: Perceptions from a Devided Region. *Contemporary Southeast Asia:A Journal of International and Strategic Affairs*, 35(3 (December 2013)), 305-332.
- Hayyes, J. (2017). Reclaiming constructivism: Identity and the practice of the study of international relations 50(1), 89-92. *PS Political Science and Politic* , 89-92.
- Jones, A. (2010). *Globalization: Key Thinkers*. Cambridge: Polity Press.
- Junio, D. R. (2014). *Asian Infrastructure Investment Bank: An Idea Whose Time Has Come? (The Diplomat)*. Dipetik January 10, 2015, dari <http://thediplomat.com/2014/12/asian-infrastructure-investment-bank-an-idea-whose-time-has-come/>
- Kaplan, R. (2011). South China Sea is The Future of Conflict. *Foreign Policy Vol 76*.
- Kelly, R. E. (2007). Security Theory in the "New Regionalism". *International Studies Review*, 9, 197-229.
- Kumar, N. (2011). *Financial Crisis and Regional Economic Cooperation in Asia-Pacific:Towards an Asian Economic Community?* UNESCAP.
- Mabrubah & Ramadhani Z. (2021). Pengaruh Prinsip Non-Intervensi ASEAN. *Global Political Studies Journal Vol 5 No 2*.
- Mabrurah, & R. (2021). Pengaruh Prinsip Non-Intervensi ASEAN . *Global Political Studies Journal Vol 5 no 2*.
- Manggala, G. (2025). Strategi Poros Maritim Dunia dalam Mewujudkan Identitas Bangsa Indonesia sebagai Bangsa Maritim . *Journal of International Relations Vol 9 No 1*, 119 -138.
- Mardhiyah & Pura. (2023). Diplomasi Ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok. *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)*, Vol. 5 No 1, 1-17.
- Miranda, A. (2008). Pelanggaran Terhadap Hak Berdaulat Indonesia: Studi Kasus Tiongkok di Laut Natuna Utara. *Journal of International Relations*, 868-877.
- Oba, M. (2014). ASEAN and the Creation of a Regional Community. *Asia Pacific Review*, 21, 63-78.
- Putri & Maarif. (2024). Kerja Sama Ekonomi-Politik Indonesia dan Cina pada Belt Road Initiative. *Jurnal Kajian Lemhamnas* , 53-66.
- Rachmawati. (2012). Konstruktivisme sebagai Jalur Alternatif. *Jurnal UPN Veteran Yogyakarta Vol 16 No 1*, 25-34.
- Raditya. (2019, September 24). Sejarah Keakraban PDIP & Partai Komunis . *Tirto.Id*.

- Rathus, J. (2011). *Japan, China and Networked Regionalism in East Asia*. London: Palgrave Macmillan.
- Smith, C. R. (2005). Theories of International Relations.
- Söderbaum, B. H. (2002). Theorising the rise of Regioness. Dalam S. Breslin (Penyunt.), *New Regionalisms in the Global Political Economy*.
- Solis, M. (Cross Regional Trade: Understanding Permeated Regionalism in East Asia). 2008. *Springer*.
- Sulistyani. (2021). Respons Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Semasa Presiden Joko Widodo. *Jurnal Politica Vol 12 No 1*.
- Thayer, C. (2013). *China's New Regional Security Treaty (The Diplomat)*. Dipetik December 20, 2014, dari <http://www.thediplomat.com/2013/10/chinas-new-regional-security-treaty-with>
- UNESCAP. (2014). *UNESCAP*. Dipetik December 30, 2014, dari www.unescap.org
- Wahyuni, A. S. (2023). One Belt One Road dan Upaya Hegemoni Regional China di AsiaTenggara . *Jurnal Sosial dan Politik Vol 9 No 1* , 114-128.
- Wendt, A. (2000). *Social Theory of International Politic*. Cambridge Press.
- Wendt, A. (2005). *Constructivism and International Relations* . United Kingdom: Routledge .
- Yuan, L. T. (1994). The ASEAN Free Trade Area. *Asia-Pacific Economic Literature*, 8, 1-7.
- Yuzawa, T. (2010). The United States and the ASEAN Community: Factors for Active US Engagement in ASEAN Community Buliding. Dalam *ASEAN Study Group Report* (hal. 126-137). The Japan Institute of International Affairs.
- Zheng, X. W. (2012). China-ASEAN Security Cooperation in Perspective. *China Institute of Contemporary International Relations (CCIR)*.
- Xinhua News. (2025) China, Indonesia reaffirm Bandung Spirit, pledge closer cooperation. Accessed through https://english.www.gov.cn/premier/news/202505/26/content_WS68334046c6d0868f4e8f2d65.html
- Tempo. (2024). Jokowi, Xi Jinping Discuss Indonesia-China Relations in Phone Call. Accessed through <https://en.tempo.co/read/1928609/jokowi-xi-jinping-discuss-indonesia-china-relations-in-phone-call>
- Socialistchina.org. (2025). China and Indonesia invoke the Bandung Spirit <https://socialistchina.org/2025/06/09/china-and-indonesia-invoke-the-bandung-spirit/>

Database China Global Investment Tracker accessed through
<https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/>

Database ATLAS of Economic Complexity. Accessed through
<https://atlas.hks.harvard.edu/explore/treemap>

Database BKPM. Accessed through <https://data.bkpm.go.id/home>